

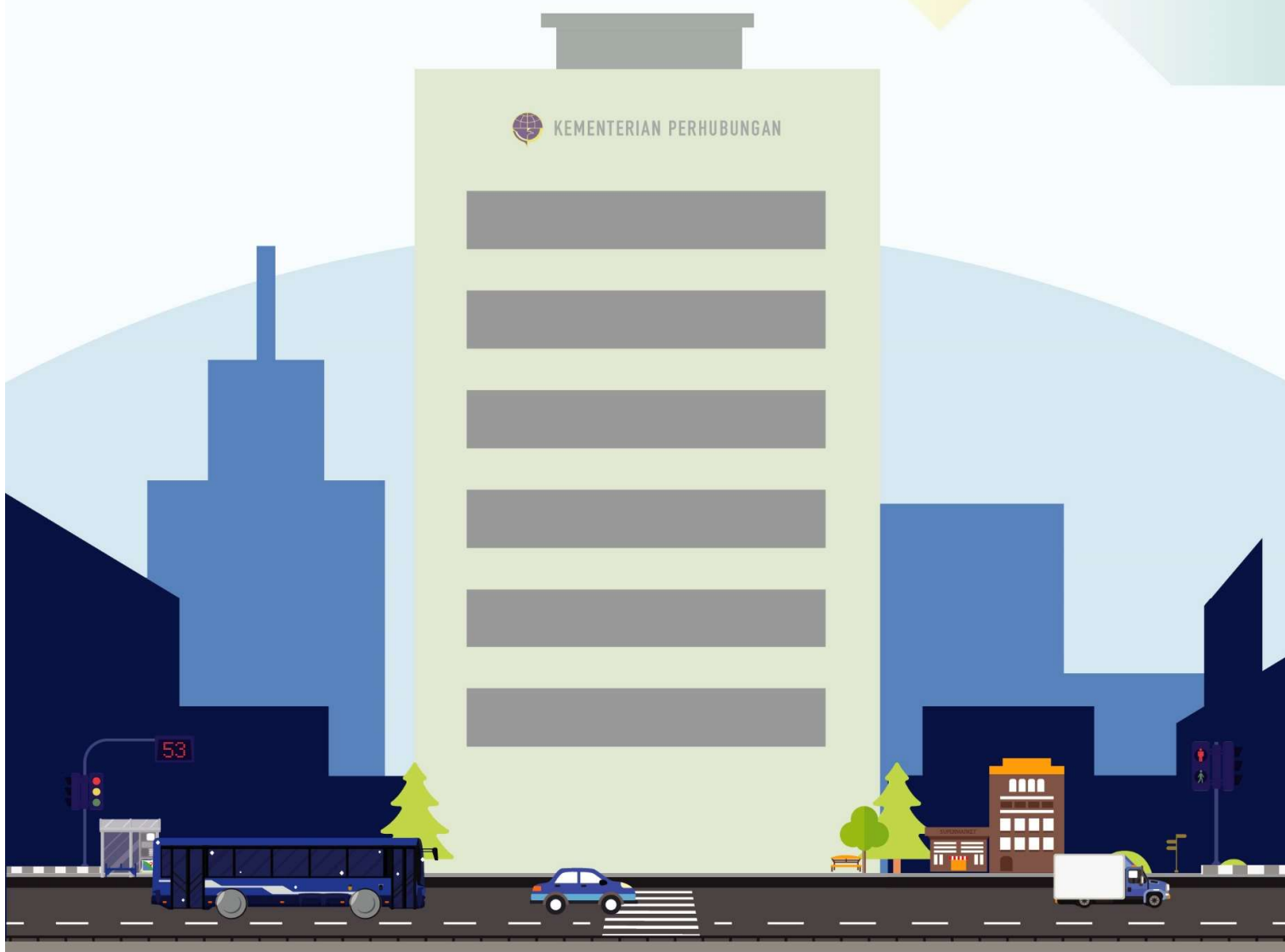
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019



direktorat jenderal perhubungan darat



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : KU. 204 / 1 / 3 / DJPD / 2020
Klasifikasi : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat Tahun 2019 (*Audited*)

Jakarta, 5 Mei 2020

Kepada

Yth. **SEKRETARIS JENDERAL**
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Di

JAKARTA

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (BA 022.03) Tahun 2019 yang Dimasukkan Dalam Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2019 (*Audited*), bersama ini terlampir disampaikan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2019 *Audited*, yang terdiri dari:
 - a. Pernyataan Tanggung Jawab;
 - b. Ringkasan Laporan Keuangan;
 - c. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - d. Neraca;
 - e. Laporan Operasional (LO);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
 - h. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN); dan
 - i. Laporan Keuangan Pendukung.
2. Demikian disampaikan, atas perkenan arahan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Drs. RUDI SETIYADI, S.H., M.Si.
NRP. 6205 0784

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
4. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, Sekretariat Jenderal;
5. Inspektur I, Inspektorat Jenderal;
6. Inspektur III, Inspektorat Jenderal.

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2020

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. Budi Setiyadi, SH., M.Si

NRP. 6205 0784



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Daftar Lampiran	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	22
C. Penjelasan atas Pos Neraca	35
D. Penjelasan atas Pos Laporan Operasional.....	68
E. Penjelasan atas Pos Laporan Perubahan Ekuitas	77
F. Pengungkapan Lainnya	82





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2020

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. Budi Setiyadi, SH., M.Si.
NRP. 6205 0784



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

LAPORAN HASIL PENILAIAN
PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Kami telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal 7 November 2019, pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah **efektif**.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah **memadai**.

Jakarta, 8 November 2019
KETUA TIM PENILAI

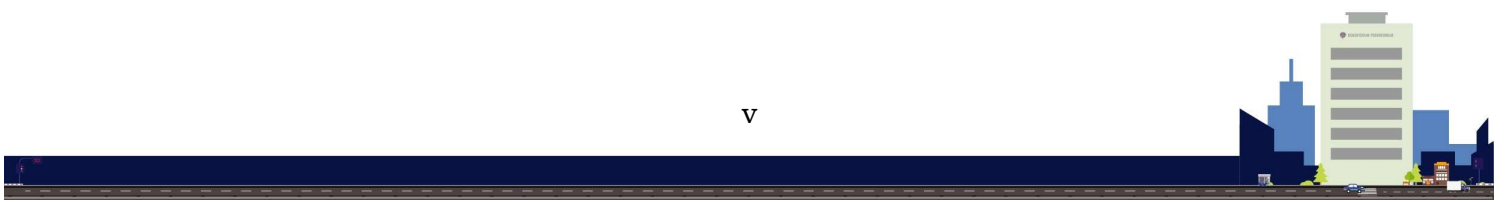
Ir. CUCU MULYANA, DESS
NIP. 19630909 199303 1 002

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak
Lampiran II	Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KU.202/1/7/DJPD/2018 tanggal 16 April 2018 perihal Tata Cara Pengelolaan dan Penatausahaan PNBPN Melalui Mekanisme Maksimum Pencairan PNBPN Secara Terpusat
Lampiran III	Rincian Jumlah PNS
Lampiran IV	Bukti setor Kas di Bendahara Pengeluaran
Lampiran V	Rincian Piutang Bukan Pajak, Kartu Piutang dan Bukti Setor atas Piutang Lainnya
Lampiran VI	Rincian Persediaan dan Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan
Lampiran VII	Rincian Tanah
Lampiran VIII	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5238/PL.201/DRJD/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Perlengkapan Jalan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Lampiran IX	Rincian Aset Tetap Renovasi
Lampiran X	Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Lampiran XI	Rincian Aset Tak Berwujud
Lampiran XII	Rincian Aset Lain-lain
Lampiran XIII	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
Lampiran XIV	Dokumen Hibah Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
Lampiran XV	Dokumen Hibah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V
Lampiran XVI	Rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar
Lampiran XVII	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.903/KU.401/DRJD/2019 tentang Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Lampiran XVIII	Berita Acara Serah Terima Aset Likuidasi
Lampiran XIX	Rincian Rekapitulasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali (IP) Barang Milik Negara
Lampiran XX	Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4951/PB/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal Tanggapan atas Persediaan yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Lampiran XXI	Rincian Aset Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) s.d. 31 Desember 2019



Lampiran XXII Rincian Barang Milik Negara yang memiliki Nilai Perolehan Minus dan Nilai Buku Minus



Ringkasan LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2019 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar Rp1.394.555.802.702,00 atau mencapai 170,07 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp820.000.000.000,00. Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp3.763.977.876.216,00 atau mencapai 95,58 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.938.111.521.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PNBP	820.000.000.000	1.394.555.802.702	518.955.000.000	1.004.785.294.550
Belanja	3.938.111.521.000	3.763.977.876.216	4.955.730.267.000	4.479.864.016.571

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp20.336.315.597.589,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp6.169.257.990.611,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp11.018.947.522.591,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3.148.110.084.387,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.566.133.529,00 dan Rp20.332.749.464.060,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):



Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	6.169.257.990.611	5.116.780.301.074	1.052.477.689.537	20,57
Aset Tetap	11.018.947.522.591	16.141.566.009.577	(5.122.618.486.986)	(31,74)
Aset Lainnya	3.148.110.084.387	3.541.136.721.311	(393.026.636.924)	(11,10)
Jumlah Aset	20.336.315.597.589	24.799.483.031.962	(4.463.167.434.373)	(18,00)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	3.566.133.529	7.265.552.407	(3.699.418.878)	(50,92)
Ekuitas				
Ekuitas	20.332.749.464.060	24.792.217.479.555	(4.459.468.015.495)	(17,99)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	20.336.315.597.589	24.799.483.031.962	(4.463.167.434.373)	(18,00)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.379.779.764.827,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp4.246.330.626.116,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp2.866.550.861.289,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp208.459.574.427,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp3.075.010.435.716,00.

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Kegiatan Operasional				
Pendapatan Operasional				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.379.779.764.827	963.840.029.331	415.923.901.796	43,15
Beban Operasional	4.246.330.626.116	3.404.808.775.376	841.521.850.740	24,72
<i>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</i>	<i>(2.866.550.861.289)</i>	<i>(2.440.968.746.045)</i>	<i>(425.852.115.244)</i>	<i>17,43</i>



Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Kegiatan Non Operasional				
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(44.317.039.243)	(38.720.126.955)	(5.596.912.288)	14,45
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(164.142.535.184)	83.458.671.686	(247.601.206.870)	(269,68)
<i>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</i>	<i>(208.459.574.427)</i>	<i>44.738.544.731</i>	<i>(253.198.119.158)</i>	<i>(565,95)</i>
Surplus (Defisit) – LO	(3.075.010.435.716)	(2.396.230.201.314)	(678.780.234.402)	28,33

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp24.792.217.479.555,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp3.075.010.435.716,00 dikurangi dengan koreksi-koreksi yang mengurangi ekuitas senilai Rp3.961.229.766.225,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.576.772.186.446,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp20.332.749.464.060,00.

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Ekuitas Awal	24.792.217.479.555	22.835.121.491.560	1.957.095.987.995	8,57
Surplus (Defisit) – LO	(3.075.010.435.716)	(2.396.230.201.314)	(678.780.234.402)	28,33
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	0	0	0	0
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	(3.961.229.766.225)	(180.520.951.111)	(3.780.708.815.114)	2.094,33
Transaksi Antar Entitas	2.576.772.186.446	4.533.847.140.420	(1.957.074.953.974)	(43,17)
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	(4.459.468.015.495)	1.957.095.987.995	(6.416.564.003.490)	(327,86)
Ekuitas Akhir	20.332.749.464.060	24.792.217.479.555	(4.459.468.015.495)	(17,99)



5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019		% Realisasi thd Angg	31 DESEMBER 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	820.000.000.000	1.394.555.802.702	170,07	1.004.785.294.550
JUMLAH PENDAPATAN		820.000.000.000	1.394.555.802.702	170,07	1.004.785.294.550
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	523.943.365.000	456.840.857.074	87,19	431.654.706.203
Belanja Barang	B.4	2.151.946.386.000	2.076.393.314.272	96,49	2.252.176.942.050
Belanja Modal	B.5	1.262.221.770.000	1.230.743.704.870	97,51	1.796.032.368.318
JUMLAH BELANJA		3.938.111.521.000	3.763.977.876.216	95,58	4.479.864.016.571



II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NERACA

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	49.986.250	55.789.800
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	15.833.700
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	684.414.147.610	1.548.781.652
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	(3.418.759.500)	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	13.590.108.184	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	5.474.622.508.067	5.115.159.895.922
Jumlah Aset Lancar		6.169.257.990.611	5.116.780.301.074
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	2.119.082.742.102	1.710.253.466.168
Peralatan dan Mesin	C.15	7.552.775.839.186	7.154.534.526.451
Gedung dan Bangunan	C.16	3.039.673.353.779	4.438.631.548.030
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	2.282.802.484.940	5.563.906.795.169
Aset Tetap Lainnya	C.18	409.956.523.197	392.740.756.147
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	738.212.141.860	387.563.873.627
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(5.123.555.562.473)	(3.506.064.956.015)
Jumlah Aset Tetap		11.018.947.522.591	16.141.566.009.577
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	1.042.741.026.288	971.107.422.889
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	C.22	-	-
Aset Lain-Lain	C.23	2.836.426.856.810	3.394.793.394.001
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(731.057.798.711)	(824.764.095.579)
Jumlah Aset Lainnya		3.148.110.084.387	3.541.136.721.311
JUMLAH ASET		20.336.315.597.589	24.799.483.031.962
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	49.986.250	55.789.800
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	3.409.805.650	7.209.762.607
Hibah Yang Belum Disahkan	C.27	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.28	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.29	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya		106.341.629	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.566.133.529	7.265.552.407
JUMLAH KEWAJIBAN		3.566.133.529	7.265.552.407
EKUITAS			
Ekuitas	C.30	20.332.749.464.060	24.792.217.479.555
JUMLAH EKUITAS		20.332.749.464.060	24.792.217.479.555
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		20.336.315.597.589	24.799.483.031.962



III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.379.779.764.827	963.840.029.331
JUMLAH PENDAPATAN		1.379.779.764.827	963.840.029.331
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	453.101.878.396	435.497.399.326
Beban Persediaan	D.3	43.873.200.310	41.319.470.717
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.269.413.220.613	1.181.066.927.560
Beban Pemeliharaan	D.5	100.145.147.151	208.935.792.232
Beban Perjalanan Dinas	D.6	222.022.525.882	240.315.617.355
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	193.245.441.775	37.538.369.000
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.961.110.452.489	1.260.135.199.186
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	3.418.759.500	-
JUMLAH BEBAN		4.246.330.626.116	3.404.808.775.376
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.866.550.861.289)	(2.440.968.746.045)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar		211.526.362	515.976.900
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		(44.528.565.605)	(39.236.103.855)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		674.332.271.389	1.054.653.354.147
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(838.474.806.573)	(971.194.682.461)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(208.459.574.427)	44.738.544.731
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(3.075.010.435.716)	(2.396.230.201.314)
POS LUAR BIASA	D.12		
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.075.010.435.716)	(2.396.230.201.314)



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
EKUITAS AWAL	E.1	24.792.217.479.555	22.835.121.491.560
Surplus/Defisit - LO	E.2	(3.075.010.435.716)	(2.396.230.201.314)
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	E.3	(3.961.229.766.225)	(180.520.951.111)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	E.3.1	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.2	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.3	388.550.354	490.406.194
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.4	443.160.618.924	
Selisih Revaluasi Aset	E.3.5	(4.681.683.482.442)	(190.671.104.356)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.6	(406.831.519.361)	9.659.790.021
Koreksi Lain-Lain	E.3.7	683.736.066.300	(42.970)
Transaksi Antar Entitas	E.4	2.576.772.186.446	4.533.847.140.420
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(4.459.468.015.495)	1.957.095.987.995
EKUITAS AKHIR	E.5	20.332.749.464.060	24.792.217.479.555



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan salah satu unit eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang Perhubungan Darat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan



- angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2019 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah 37 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah Jenis Kewenangan	
			KP	KD
1	412735	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	√	
2	352596	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	√	
3	352597	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	√	
4	352598	Direktorat Lalu Lintas Jalan	√	
5	352599	Direktorat Angkutan Jalan	√	
6	352600	Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	√	
7	466570	Direktorat Sarana Perhubungan Darat *)	√	
8	466941	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat *)	√	
9	445510	Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat *)	√	
10	418881	Direktorat Angkutan dan Multimoda *)	√	
11	439159	Direktorat Pembinaan Keselamatan *)	√	



No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah Jenis Kewenangan	
			KP	KD
12	025734	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi	√	
13	403841	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I		√
14	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II		√
15	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III		√
16	403844	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV		√
17	403845	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V		√
18	403846	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI		√
19	403847	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII		√
20	403848	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII		√
21	403849	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX		√
22	403850	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X		√
23	403851	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI		√
24	403852	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII		√
25	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII		√
27	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV		√
28	403855	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV		√
29	403857	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI		√
30	403858	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII		√
31	403859	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII		√
32	403861	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX		√
33	403863	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI		√
34	403864	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII		√
35	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII		√
36	403866	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV		√
37	403867	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV		√
Jumlah			12	25
Keterangan: *) Satker Inaktif (telah dilakukan likuidasi sesuai PM 122 Tahun 2018, pada tanggal 28 Juni 2019)				

A.3 Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:



1. Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran

- a) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan – Laporan Operasional

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran



tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- d) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 2) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - o Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.



- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- 6) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
- o harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - o harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - o harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b) Aset Tetap

- 1) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - o Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - o Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
- Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- 4) Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- 5) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum



tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- 6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c) Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - o Tanah;
 - o Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - o Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun



d) Piutang Jangka Panjang

- a) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e) Aset Lainnya

- a) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- b) Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- c) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- d) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:



Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i> Komputer	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- e) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

f) Kewajiban

- a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.



- c) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

g) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

h) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2016 pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2016 yang berbasis *cash towards accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam laporan Operasional dan laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2016 adalah merupakan implementasi yang pertama.



B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi	%
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	820.000.000.000	1.394.555.802.702	(574.555.802.702)	170,07
Jumlah Pendapatan dan Hibah	820.000.000.000	1.394.555.802.702	(574.555.802.702)	170,07
BELANJA				
Belanja Pegawai	523.943.365.000	456.840.857.074	67.102.507.926	87,19
Belanja Barang	2.151.946.386.000	2.076.393.314.272	75.553.071.728	96,49
Belanja Modal	1.262.221.770.000	1.230.743.704.870	31.478.065.130	97,51
Jumlah Belanja	3.938.111.521.000	3.763.977.876.216	174.133.644.784	95,58

B.1 PENDAPATAN NEGARA

Realisasi Pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.394.555.802.702,00 atau 170,07 persen. Realisasi Pendapatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dihasilkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Pemindahtanganan BMN, Sewa Tanah dan Bangunan, Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan, Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Jasa Transportasi, Pendapatan Jasa Kepelabuhanan, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Pendapatan Lain-lain.



Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan
sampai dengan 31 Desember 2019
(dalam rupiah)*

Uraian	2019		2018	Kenaikan (Penurunan)	
	Estimasi	Realisasi	Realisasi	Jumlah	%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan dan Pemindahtanganan BMN	-	3.958.368.219	1.265.887.100	2.692.481.119	212,70
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	41.769.950.000	21.943.150.002	7.142.650.000	14.800.500.002	207,21
Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	771.236.980.000	1.327.042.275.000	938.634.625.000	388.407.650.000	41,38
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	2.349.030.000	4.373.928.682	4.208.587.350	165.341.332	3,93
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kelautan	-	170.000	-	170.000	-
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	4.644.040.000	10.562.675.000	10.031.450.002	531.224.998	5,30
Pendapatan Bunga, pengelolaan Rekening Perbankan	-	127.376.012	28.707	127.347.305	443.610,64
Pendapatan Denda	-	12.110.724.253	2.766.951.513	9.343.772.740	337,69
Pendapatan Lain-lain	-	14.437.135.534	40.735.114.878	(26.297.979.344)	(64,56)
Jumlah	820.000.000.000	1.394.555.802.702	1.004.785.294.550	389.770.508.152	38,79

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 38,79 persen dibandingkan 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan, Pendapatan Jasa Transportasi, Pendapatan Iuran dan Denda, dan Pendapatan Lain-lain.



Rincian Pendapatan
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	
		Pendapatan	%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	19.100.100	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	192.426.262	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	3.746.841.857	-
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum			
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	41.769.950.000	21.943.150.002	52,53
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika			
Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	771.236.980.000	1.327.042.275.000	172,07
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	2.349.030.000	4.373.928.682	186,20
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	-	170.000	-
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	4.644.040.000	10.562.675.000	227,45
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	-	127.376.012	-
Pendapatan Denda	-	12.110.724.253	-
Pendapatan Lain-lain			-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	18.156.413	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	9.322.211.684	
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	5.096.767.404	
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	-	33	
Jumlah	820.000.000.000	1.394.555.802.702	170,07

Dari nilai realisasi pendapatan sebesar Rp1.394.555.802.702,00, diantaranya merupakan pendapatan Direktorat Sarana Transportasi Jalan atas Pelayanan Penerbitan Dokumen Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sebesar Rp1.327.042.275.000,00, pendapatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi atas Pelayanan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.907.475.000,00, pendapatan Direktorat Angkutan Jalan atas Pelayanan Perizinan Angkutan Jalan sebesar Rp8.914.175.000,00, pendapatan Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan



atas Pelayanan Jasa Sertifikasi Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi sebesar Rp7.187.500,00. Pendapatan Direktorat Lalu Lintas Jalan atas Pelayanan Jasa Analisis Dampak Lalu Lintas sebesar Rp851.700.000,00 dan pendapatan Jasa Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan sebesar Rp4.373.928.682,00 yang terdapat pada 3 (tiga) Satuan Pelayanan (Satpel), yaitu:

1. Satpel Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi pada BPTD Wilayah XIII sebesar Rp161.479.475,00;
2. Satpel Pelabuhan Penyeberangan Kariangau pada BPTD Wilayah XVII sebesar Rp3.856.053.625,00;
3. Satpel Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo pada BPTD Wilayah XXI sebesar Rp356.395.582,00.

Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan senilai Rp170.000,00 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari PNBPD Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diperoleh atas pelayanan jasa bidang perkapalan dan kepelautan, jasa pengawasan barang berbahaya, jasa pengawasan kapal asing, dan penerbitan sertifikat keamanan kapal internasional, namun karena adanya kesalahan penyetoran melalui Rekening Kas Umum Negara sehingga masuk ke dalam Laporan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Realisasi Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.327.042.275.000,00 atau 172,07% dari nilai Target/Estimasi Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp771.236.980.000,00. Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut merupakan Pelayanan Penerbitan Dokumen Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Realisasi Pendapatan sangat signifikan diantaranya berasal dari implementasi Pelayanan Penerbitan *electronic*-Sertifikat Registrasi Uji Tipe (e-SRUT).



Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KU.202/1/7/DJPD/2018 tanggal 16 April 2018 perihal Tata Cara Pengelolaan dan Penatausahaan PNBPN melalui Mekanisme Maksimum Pencairan PNBPN Secara Terpusat, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018 pengelolaan dan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan secara Terpusat dengan satuan kerja (412735) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai satuan kerja penampung realisasi PNBPN guna melakukan Rekonsiliasi PNBPN dan Maksimum Pencairan PNBPN secara Terpusat.

Penggunaan sebagian dana PNBPN mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/KMK.02/2018 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, yang menyetujui penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, paling tinggi sebesar 33,58%.

Rincian Pendapatan terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.



B.2 BELANJA NEGARA

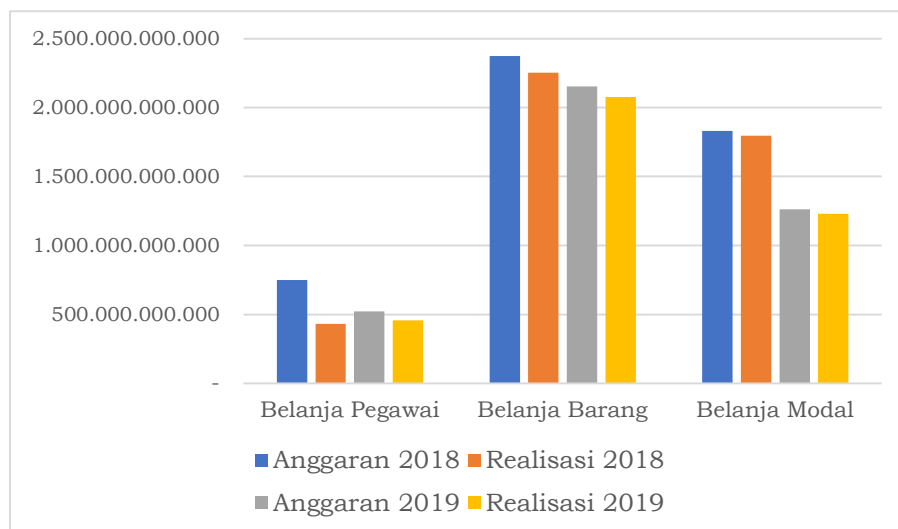
Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.763.977.876.216,00 atau 95,58 persen dari anggaran belanja sebesar Rp3.938.111.521.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019
(dalam rupiah)*

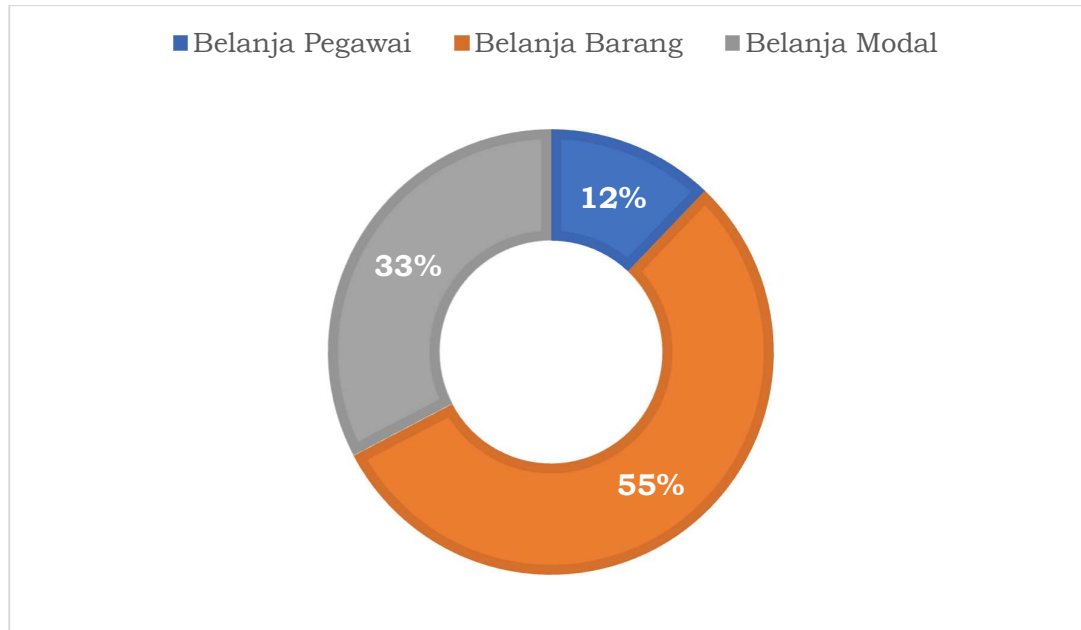
Uraian	31 Desember 2019			31 Desember 2018	
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Realisasi	% Naik (Turun)
Belanja Pegawai	523.943.365.000	456.840.857.074	87,19	431.654.706.203	5,83
Belanja Barang	2.151.946.386.000	2.076.393.314.272	96,49	2.252.176.942.050	(7,81)
Belanja Modal	1.262.221.770.000	1.230.743.704.870	97,51	1.796.032.368.318	(31,47)
Jumlah	3.938.111.521.000	3.763.977.876.216	95,58	4.479.864.016.571	(15,98)

Komposisi pagu anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)*



*Komposisi Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2019
(dalam rupiah)*



B.3 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp456.840.857.074,00 dan Rp431.654.706.203,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,83 persen dari 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. kenaikan gaji berkala pegawai negeri;
- b. penambahan jumlah pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan operasional.



Rincian Jumlah Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdapat pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

Rincian Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

*Realisasi Belanja Pegawai
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2019		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA PEGAWAI					
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					
Belanja Gaji Pokok PNS	179.053.055.000	166.028.465.398	92,73	160.238.450.210	3,61
Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.509.000	2.200.845	48,81	2.491.822	(11,68)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	16.548.517.000	13.607.238.910	82,23	13.209.863.402	3,01
Belanja Tunj. Anak PNS	5.458.912.000	4.035.282.324	73,92	4.012.300.884	0,57
Belanja Tunj. Struktural PNS	2.557.205.000	2.457.080.000	96,08	2.440.970.000	0,66
Belanja Tunj. Fungsional PNS	217.865.000	198.205.000	90,98	196.465.000	0,89
Belanja Tunj. PPh PNS	650.196.000	428.275.998	65,87	194.936.886	119,70
Belanja Tunj. Beras PNS	11.720.810.000	9.452.317.120	80,65	9.775.760.250	(3,31)
Belanja Uang Makan PNS	35.991.082.000	27.048.538.811	75,15	26.637.537.043	1,54
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	177.450.000	-	-	-	-
Belanja Tunj. Umum	9.735.181.000	8.611.315.000	88,46	8.760.055.000	(1,70)
Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	-	-	-	-	-
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	262.114.782.000	231.868.919.406	88,46	225.468.830.497	2,84
Belanja Lembur					
Belanja Uang Lembur	25.171.067.000	11.758.257.936	46,71	4.021.182.000	192,41
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	25.171.067.000	11.758.257.936	46,71	4.021.182.000	192,41
Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito					
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	236.657.516.000	213.213.679.732	90,09	202.164.693.706	5,47
Belanja Pegawai Transito	-	-	-	-	-
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	236.657.516.000	213.213.679.732	90,09	202.164.693.706	5,47
Belanja Asuransi Kesehatan					
Belanja Askes PNS	-	-	-	-	-
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5132	-	-	-	-	-
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	523.943.365.000	456.840.857.074	87,19	431.654.706.203	5,83



B.4 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.076.393.314.272,00 dan Rp2.525.176.942.050,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019 mengalami penurunan 7,81 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018.

Rincian Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

*Realisasi Belanja Barang
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2019		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA BARANG					
Belanja Barang Operasional	336.445.945.000	326.896.080.612	97,16	258.811.106.883	26,31
Belanja Barang Non Operasional	822.910.755.000	776.010.241.593	94,30	799.820.614.075	(2,98)
Belanja Barang Persediaan	54.877.074.000	53.295.053.173	97,12	62.131.716.265	(14,22)
Belanja Jasa	131.211.674.000	125.295.083.377	95,49	121.676.493.120	2,97
Belanja Pemeliharaan	142.855.702.000	137.693.591.960	96,39	230.681.533.617	(40,31)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	218.619.432.000	216.238.090.806	98,91	236.377.160.167	(8,52)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	5.959.357.000	5.784.435.076	97,06	3.938.457.188	46,87
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah	439.066.447.000	435.180.737.675	99,12	538.739.860.735	(19,22)
Jumlah	2.151.946.386.000	2.076.393.314.272	96,49	2.252.176.942.050	(7,81)

B.5 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.230.743.704.870,00 dan Rp1.796.032.368.318,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019 mengalami penurunan 31,47 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018.



*Realisasi Belanja Modal
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2019		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	8.778.223.000	5.868.323.970	66,85	10.518.897.280	(44,21)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	576.149.124.000	573.685.276.003	99,57	956.135.660.893	(40,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	513.190.648.000	489.558.945.603	95,40	545.603.835.374	(10,27)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	121.676.493.120	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	164.103.775.000	161.631.159.294	98,49	283.680.724.771	(43,02)
Jumlah	1.262.221.770.000	1.230.743.704.870	97,51	1.917.615.611.438	(35,82)

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.868.323.970,00 dan Rp10.518.897.280,00. Realisasi pada 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 44,21 persen dibandingkan 31 Desember 2018.

Rincian Belanja Modal Tanah sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL TANAH					
Belanja Modal Tanah	8.554.223.000	5.656.848.970	66,13	10.162.480.000	(44,34)
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-	197.243.000	(100,00)
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	224.000.000	211.475.000	94,41	28.526.080	641,34
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-	130.648.200	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	8.778.223.000	5.868.323.970	66,85	10.518.897.280	(44,21)
Pengembalian Belanja	-	-	-	-	-
Jumlah	8.778.223.000	5.868.323.970	66,85	10.518.897.280	(44,21)



B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp573.685.276.003,00 dan Rp956.135.660.893,00. Realisasi pada 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 40,00 persen dibandingkan 31 Desember 2018.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	560.306.221.000	558.298.164.346	99,64	956.208.002.650	(41,61)
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	15.842.903.000	15.814.419.500	99,82	-	-
Jumlah Belanja Kotor	576.149.124.000	574.112.583.846	99,65	956.208.002.650	(39,96)
Pengembalian Belanja	-	427.307.843	-	72.341.757	490,68
Jumlah	576.149.124.000	573.685.276.003	99,57	956.135.660.893	(40,00)

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp489.558.945.603,00 dan Rp545.603.835.374,00. Realisasi pada 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 10,27 persen dibandingkan 31 Desember 2018.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:



Uraian	31 Desember 2019		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN					
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	496.127.218.000	472.789.039.403	95,30	522.776.107.374	(9,56)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	90.000.000	89.000.000	98,89	-	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	16.973.430.000	16.680.906.200	98,28	22.827.728.000	(26,93)
Jumlah Belanja Kotor	513.190.648.000	489.558.945.603	95,40	545.603.835.374	(10,27)
Pengembalian Belanja	-	-	-	-	-
Jumlah	513.190.648.000	489.558.945.603	95,40	545.603.835.374	(10,27)

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp93.250.000,00. Realisasi pada 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dibandingkan 31 Desember 2018.

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN					
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	-
Belanja Modal Irigasi	-	-	-	-	-
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	93.250.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-	93.250.000	(100,00)
Pengembalian Belanja	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	93.250.000	(100,00)



B.5.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp161.631.159.294,00 dan Rp283.680.724.771,00. Realisasi pada 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 43,02 persen dibandingkan 31 Desember 2018.

Rincian Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL LAINNYA					
Belanja Modal Lainnya	164.103.775.000	161.631.159.294	98,49	283.680.724.771	(43,02)
Jumlah Belanja Kotor	164.103.775.000	161.631.159.294	98,49	283.680.724.771	(43,02)
Pengembalian Belanja	-	-	-	-	-
Jumlah	164.103.775.000	161.631.159.294	98,49	283.680.724.771	(43,02)



C. PENJELASAN ATAS POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp49.986.250,00 dan Rp55.789.800,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)*

Unit Kerja	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	49.986.250	0	49.986.250	0,00
Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat	0	55.789.800	(55.789.800)	(100,00)
Jumlah	49.986.250	55.789.800	(5.803.550)	(10,40)

Terhadap saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada tanggal 08 Januari 2020 dengan NTPN: DC67A1JNEPEE50CD, sebagaimana bukti setor terdapat pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Nilai Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp15.833.700,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas



pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)*

Unit Kerja	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII	0	8.418.300	(8.418.300)	(100,00)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI	0	7.415.400	(7.415.400)	(100,00)
Jumlah	0	15.833.700	(15.833.700)	(100,00)

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0,00
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0	0	0,00
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	0	0	0	0,00



C.4 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp684.414.147.610,00 dan Rp1.548.781.652,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)*

Unit Kerja	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
Direktorat Sarana Transportasi Jalan	683.751.900.000	0	683.751.900.000	-
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II	0	273.762.383	(273.762.383)	(100,00)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III	0	200.116.134	(200.116.134)	(100,00)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII	169.356.432	262.272.864	(92.916.432)	(35,43)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX	0	120.174.879	(120.174.879)	(100,00)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV	93.705.388	0	93.705.388	-
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI	91.476.000	105.761.025	(14.285.025)	(13,51)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII	0	63.840.342	(63.840.342)	(100,00)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX	0	18.854.025	(18.854.025)	(100,00)
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX	307.709.790	0	307.709.790	-
Direktorat Pembinaan Keselamatan	0	504.000.000	(504.000.000)	(100,00)
Jumlah	684.414.147.610	1.548.781.652	682.865.365.958	44.090,49



Kenaikan nilai Piutang Bukan Pajak yang signifikan berasal dari Pengakuan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan atas Potensi Kekurangan PNBP atas Jasa Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) tahun 2017 senilai Rp683.751.900.000,00, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Pelayanan Pengujian Tipe dan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Instansi Lainnya Tahun 2016 dan 2017 Nomor 82/HP/XIV/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

Selain itu, saldo Piutang Lainnya merupakan pengakuan piutang atas Pengembalian Belanja akibat kelebihan pembayaran/kekurangan volume atau tidak sesuainya pelaksanaan pekerjaan dengan Kontrak, yang terdapat pada:

1. BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, sebesar Rp169.356.432 pada tiga paket pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Dermaga Ponton dan SPBU Apung 16 Ilir Paket I, sebesar Rp67.739.308, yang telah dilakukan penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Negara pada tanggal 17 Maret 2020 dengan NTPN: 61B962G4UK711APU dan FE00B3CIEERUL1D9;
 - b. Pembangunan Dermaga Bongkar Muat Jukung (Kapal Barang) 16 Ilir Paket II, sebesar Rp13.101.256,00, yang telah dilakukan penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Negara pada tanggal 17 Maret 2020 dengan NTPN: 9F23B7QLTJLBFOE dan 097A08N3DEA92V9L; dan
 - c. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Nyato Tahap II, sebesar Rp88.515.868,00 yang telah dilakukan penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Negara pada tanggal 17 Maret 2020 dengan NTPN: DCDC20N9UV2878BE.
2. BPTD Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat, pada pekerjaan Pembangunan Terminal Barang Internasional Nanga Badau Tahap II, sebesar Rp93.705.388,00, yang telah dilakukan penyetoran



kelebihan pembayaran ke Kas Negara pada tanggal 29 April 2020 dengan NTPN: 556111JNEPO066EL;

3. BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah, pada pekerjaan Rehabilitasi Terminal Tipe A WA Gara, sebesar Rp91.476.000,00, yang telah dilakukan penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Negara pada tanggal 15 April 2020 dengan NTPN: 944AA0N9UV50JH6E;
4. BPTD Wilayah XX Provinsi Sulawesi Tengah, pada pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Boniton Tahap II, sebesar Rp307.709.790,00, yang telah dilakukan penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Negara pada tanggal 07 April 2020 dengan NTPN: 164206U8DP5LBMPJ.

Rincian Piutang Bukan Pajak, Kartu Piutang dan Bukti Setor Piutang Lainnya terdapat pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan



C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.418.759.500,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih terdapat pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan yang berasal dari penyisihan sebesar 5‰ (lima permill) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar atau $5/1000 \times \text{Rp}683.751.900.000,00$ atau sebesar Rp3.418.759.500,00.

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Nilai Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp13.590.108.184,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Belanja Modal Dibayar di Muka muncul karena progres penyelesaian pekerjaan per 31 Desember 2019 belum selesai 100% namun pembayarannya sudah dilakukan secara penuh atau 100%. Belanja Modal Dibayar di Muka terdapat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp13.590.108.184,00 pada dua paket pekerjaan sebagai berikut:

1. Pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk Sambas dan Nanga Badau, yang diketahui progress penyelesaian pekerjaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar 95,37% sehingga pekerjaan yang belum selesai adalah sebesar 4,63% atau senilai Rp1.121.827.400,00.
2. Pembangunann TBI Nanga Badau Tahap II, yang diketahui bahwa progress penyelesaian pekerjaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar 63,84% sehingga pekerjaan yang belum selesai adalah sebesar 36,16% atau senilai Rp12.468.280.784,00.



C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp5.474.622.508.067,00 dan Rp5.115.159.895.922,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan yang signifikan, terdiri atas barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional (Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan, Suku Cadang, Bahan Baku, dan Persediaan Lainnya) sebesar Rp75.242.610.171,00 dan Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sebesar Rp5.399.379.897.896,00.

Rincian Persediaan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:



*Rincian Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
Barang Konsumsi	70.613.223.610	60.055.168.622	10.558.054.988	17,58
Bahan untuk Pemeliharaan	73.331.505	49.285.048	24.046.457	48,79
Suku Cadang	2.655.020	271.736.810	(269.081.790)	(99,02)
Pita Cukai, Materai, dan Leges	-	151.800	(151.800)	(100,00)
Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	1.512.688.598.340	1.344.899.029.886	167.789.568.454	12,48
Peralatan dan Mesin untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	1.724.378.513.140	1.471.026.694.334	253.351.818.806	17,22
Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	1.902.923.146.025	1.973.004.518.531	(70.081.372.506)	(3,55)
Aset Tetap Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	257.461.461.391	256.873.861.391	587.600.000	0,23
Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.770.879.000	1.770.879.000	-	0,00
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	157.300.000	157.300.000	-	0,00
Bahan Baku	8.210.200	8.454.800	(244.600)	(2,89)
Persediaan Lainnya	4.545.189.836	7.042.815.700	(2.497.625.864)	(35,46)
Jumlah	5.474.622.508.067	5.115.159.895.922	359.462.612.145	7,03

Dari nilai Barang Konsumsi sebesar Rp75.242.610.171,00, diantaranya yang memiliki nilai signifikan berupa Kartu Uji (*Smart Card*) pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan sebesar Rp33.613.837.339,00; Blanko Tilang pada Direktorat Lalu Lintas Jalan sebesar Rp10.343.696.792,00; dan Blanko Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Kendaraan Bermotor pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan sebesar Rp5.867.048.000,00.

Untuk saldo Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sebesar Rp5.399.379.897.896,00, dapat diklasifikasikan ke dalam Dermaga Penyeberangan, Kapal Penyeberangan, Bus, Rambu, *Area Traffic Control System* (ATCS), Terminal Penumpang dan Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat lainnya. Nilai Dermaga Penyeberangan sebesar Rp3.527.162.611.578,00; Kapal Penyeberangan sebesar



Rp194.825.305.534,00; Bus sebesar Rp1.046.535.563.540,00, Rambu sebesar Rp185.944.840.811,00, *Area Traffic Control System* (ATCS) sebesar Rp140.360.240.770,00, Terminal Penumpang sebesar Rp67.591.597.103,00; dan Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat lainnya sebesar Rp236.959.738.560,00.

*Rincian Jenis Persediaan yang akan Diserahkan
kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah
(dalam rupiah)*

No.	Jenis Persediaan	Nilai
1.	Dermaga Penyeberangan	3.527.162.611.578
2.	Kapal Penyeberangan	194.825.305.534
3.	Bus	1.046.535.563.540
4.	Rambu	185.944.840.811
5.	<i>Area Traffic Control System (ATCS)</i>	140.360.240.770
6.	Terminal Penumpang	67.591.597.103
7.	Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Lainnya	236.959.738.560
Total		5.399.379.897.896

Saldo Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat memiliki nilai yang signifikan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Masih dalam proses pengajuan pemindahtanganan sebesar Rp4.043.401.609.927,00 atau sebesar 74,89%, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) sebesar Rp187.534.314.263,00 belum dapat diusulkan karena masih dalam tahap pengerjaan;
 - 2) Sebesar Rp206.183.322.417,00 merupakan pekerjaan yang baru selesai pada Tahun 2019;
 - 3) sebesar Rp81.816.016.116,00 merupakan asset P3D yang akan dilakukan reklasifikasi ke asset tetap;
 - 4) sebesar Rp1.725.919.614.583,00 telah telah dilakukan inventarisasi dan pengumpulan data dukung pada Tahun 2019;
 - 5) sebesar Rp1.803.126.526.948,00 sedang dalam proses identifikasi, inventarisasi dan verifikasi kelengkapan data



- dukung per pemerintah daerah per NUP yang akan diselesaikan pada Semester II Tahun 2020; dan
- 6) sebesar Rp38.821.815.600,00 data dukung telah lengkap dan siap diusulkan pada bulan Mei 2020.
- b. Telah diusulkan permohonan persetujuan pemindahtanganan sebesar Rp984.495.049.804,00 atau sebesar 18,23%, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) permohonan pemindahtanganan yang telah diusulkan sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp584.942.608.245,00; dan
 - 2) permohonan pemindahtanganan yang telah diusulkan dari Januari s.d. April 2020 senilai Rp435.552.441.559,00.
- c. Barang tersebut direncanakan untuk dihapuskan pada tahun 2020 sebesar Rp371.483.238.165,00 atau sebesar 6,88%.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4951/PB/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal Tanggapan atas Persediaan yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dalam hal Barang Milik Negara (BMN), berupa barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, sudah tidak berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang (KPB), namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan/serah terima masih dalam proses:

- 1) dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- 2) tidak disajikan dalam Neraca;
- 3) diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaL-BMN) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Ketentuan tersebut dapat dilaksanakan setelah KPB mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan.



Rincian Persediaan dan Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat terdapat pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.



C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Darat per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.119.082.742.102,00 dan Rp1.710.253.466.168,00.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Tanah
a	b	c
000	Saldo Awal	1.710.253.466.168,
100	Koreksi Saldo Awal	0,
101	Pembelian	211.475.000,
102	Transfer Masuk	300.726.171.858,
103	Hibah (Masuk)	146.848.289.952,
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	5.216.848.970,
107	Reklasifikasi Masuk	2.465.000.000,
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0,
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	0,
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	0,
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	0,
202	Pengembangan Nilai Aset	45.000.000,
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	3.485.882.022,
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	17.713.258.000,
208	Pengembangan Melalui KDP	4.656.941.000,
209	Transaksi Normalisasi BMN	0,
221	Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi	0,
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	0,
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	0,
225	Koreksi Kesalahan input IP	309.306.357.000,
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	0,
232	Koreksi Transfer Masuk	7.160.814.000,
237	Koreksi BMN ditemukan Kembali	0,
238	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,
245	Koreksi Nilai barang Berlebih	0,
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0,
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	0,
301	Penghapusan	0,
302	Transfer Keluar	(379.190.851.858,)
304	Reklasifikasi Keluar	(2.489.000.000,)
305	Koreksi Pencatatan	(166.096.010,)
307	Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	0,
321	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,
331	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	0,
334	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	(7.160.814.000,)
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0,
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
393	Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
394	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	0,



Kode	Uraian Transaksi	Tanah
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
395	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	0,
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	0,
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	0,
	Jumlah	2.119.082.742.102,

Mutasi Aset Tetap Tanah diantaranya berasal dari transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk sebesar Rp(379.190.851.858,00) dan Rp300.726.171.858,00 yang disebabkan oleh perubahan Organisasi pada Satker Direktorat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai amanat dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya nilai Hibah Masuk sebesar Rp146.848.289.952,00 berasal dari pengalihan Aset P3D untuk Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang tercatat pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Rincian Tanah terdapat pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp7.552.775.839.186,00 dan Rp7.154.534.526.451,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Peralatan dan Mesin
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
000	Saldo Awal	7.154.534.526.451,
100	Koreksi Saldo Awal	16.598.394.064,
101	Pembelian	36.698.391.417,
102	Transfer Masuk	4.237.325.703.277,
103	Hibah (Masuk)	5.041.015.355,
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	771.588.349.588,
107	Reklasifikasi Masuk	1.831.563.483.990,
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	372.666.600,
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	0,



Kode	Uraian Transaksi	Peralatan dan Mesin
a	b	c
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	0,
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	22.613.254.843,
202	Pengembangan Nilai Aset	206.136.900,
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	23.863.182.783,
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,
208	Pengembangan Melalui KDP	7.846.975.972,
209	Transaksi Normalisasi BMN	(21.251.286.377,)
221	Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi	0,
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	0,
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	0,
225	Koreksi Kesalahan input IP	0,
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	0,
232	Koreksi Transfer Masuk	0,
237	Koreksi BMN ditemukan Kembali	0,
238	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,
245	Koreksi Nilai barang Berlebih	0,
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0,
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	0,
301	Penghapusan	(26.426.603.700,)
302	Transfer Keluar	(3.296.399.419.794,)
304	Reklasifikasi Keluar	(1.762.706.544.539,)
305	Koreksi Pencatatan	(507.519.488.521,)
307	Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	(352.946.712.051,)
321	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,
331	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	0,
334	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	0,
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0,
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
393	Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
394	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
395	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	0,
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	0,
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(588.226.187.072,)
	Jumlah	7.552.775.839.186,

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin diantaranya berasal dari transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk sebesar Rp(3.296.399.419.794,00) dan Rp4.237.325.703.277,00 yang disebabkan oleh perubahan Organisasi pada Satker Direktorat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai amanat dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.



Selanjutnya nilai Hibah Masuk sebesar Rp5.041.015.355,00 berasal dari pengalihan Aset P3D untuk Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang tercatat pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5238/PL.201/DRJD/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Perlengkapan Jalan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, telah dilakukan penyesuaian pencatatan terhadap aset Perlengkapan Jalan per unit sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan cara melakukan Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk sebesar Rp(1.762.706.544.539,00) dan Rp1.831.563.483.990,00.

Nilai Koreksi Pencatatan, yang cukup signifikan, sebesar Rp(507.519.488.521,00) disebabkan adanya koreksi terhadap aset Marka Jalan, Paku Jalan, Patok Lalin (Deliniator) dan Pita Penggaduh yang tidak memenuhi persyaratan untuk diakui/dicatat sebagai aset tetap.

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp3.039.673.353.779,00 dan Rp4.438.631.548.030,00

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Gedung dan Bangunan
a	b	c
000	Saldo Awal	4.438.631.548.030,
100	Koreksi Saldo Awal	10.624.678.543,
101	Pembelian	35.419.002,
102	Transfer Masuk	2.942.964.822.448,
103	Hibah (Masuk)	140.508.578.287,
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	23.608.443.876,
107	Reklasifikasi Masuk	225.474.510.695,
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	3.514.507.301,
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	0,
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	801.078.000,
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,



Kode	Uraian Transaksi	Gedung dan Bangunan
a	b	c
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	127.014.053.406,
202	Pengembangan Nilai Aset	677.601.000,
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(1.574.081.357,)
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	(35.584.414.351,)
208	Pengembangan Melalui KDP	47.086.737.262,
209	Transaksi Normalisasi BMN	(125.427.581.212,)
221	Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi	0,
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	8.448.729.692,
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	(4.964.820.673,)
225	Koreksi Kesalahan input IP	(1.442.783.742.000,)
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	(484.887.827,)
232	Koreksi Transfer Masuk	(1.438.645.242.000,)
237	Koreksi BMN ditemukan Kembali	0,
238	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(184.308.812.052,)
245	Koreksi Nilai barang Berlebih	2.985.938.000,
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0,
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	0,
301	Penghapusan	(269.935.997,)
302	Transfer Keluar	(2.942.964.822.448,)
304	Reklasifikasi Keluar	(328.051.166.383,)
305	Koreksi Pencatatan	(45.746.948.223,)
307	Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	0,
321	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	179.471.363.000,
331	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	1.455.918.332.000,
334	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	(17.273.090.000,)
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0,
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
393	Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
394	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
395	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	0,
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	0,
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(13.442.240,)
	Jumlah	3.039.673.353.779,

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan diantaranya berasal dari transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk sebesar Rp(2.942.964.822.448,00) dan Rp2.942.964.822.448,00 yang disebabkan oleh perubahan Organisasi pada Satker Direktorat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai amanat dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya nilai Hibah Masuk sebesar Rp140.508.578.287,00 berasal dari pengalihan Aset P3D untuk Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana



Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang tercatat pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Mutasi Tambah yang signifikan dikarenakan adanya transaksi transfer keluar atas 224 pada Direktorat Prasarana Perhubungan Darat (inaktif) senilai Rp1.455.918.332.000,00.

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.282.802.484.940,00 dan Rp5.563.906.795.169,00.

Mutasi transaksi terhadap Jalan dan Jembatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Jalan dan jembatan
a	b	c
000	Saldo Awal	4.615.517.540.846,
100	Koreksi Saldo Awal	1.068.851.968,
101	Pembelian	0,
102	Transfer Masuk	2.793.706.384.023,
103	Hibah (Masuk)	4.560.767.576,
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	7.987.264.500,
107	Reklasifikasi Masuk	225.678.073.000,
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	749.403.081,
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	28.418.123.000,
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	0,
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	25.369.852.750,
202	Pengembangan Nilai Aset	100.000.000,
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.783.700.000,
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	17.562.388.002,
208	Pengembangan Melalui KDP	0,
209	Transaksi Normalisasi BMN	(22.144.971.750,)
221	Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi	0,
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	3.286.843.852,
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	(23.089.271.860,)
225	Koreksi Kesalahan input IP	(3.242.766.456.000,)
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	(5.129.162.140,)
232	Koreksi Transfer Masuk	(3.490.873.941.000,)
237	Koreksi BMN ditemukan Kembali	196.016.000,
238	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,
245	Koreksi Nilai barang Berlebih	(46.365.447.000,)
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0,
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	0,
301	Penghapusan	(596.744.360,)
302	Transfer Keluar	(2.783.400.235.351,)
304	Reklasifikasi Keluar	(23.236.020.000,)



Kode	Uraian Transaksi	Jalan dan jembatan
a	b	c
305	Koreksi Pencatatan	(14.174.309.000,)
307	Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	0,
321	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,
331	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	2.054.774.752.000,
334	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	1.231.727.212.000,
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0,
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
393	Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
394	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
395	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	0,
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	0,
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(10.936.953.267,)
	Jumlah	1.349.773.660.870,

Mutasi transaksi terhadap Irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Irigasi
a	b	c
000	Saldo Awal	929.939.809.848,
100	Koreksi Saldo Awal	2.672.856.332,
101	Pembelian	50.000.000,
102	Transfer Masuk	595.662.818.022,
103	Hibah (Masuk)	239.998.000,
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	66.577.437.141,
107	Reklasifikasi Masuk	27.229.467.000,
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	160.619.599,
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	0,
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	0,
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	0,
202	Pengembangan Nilai Aset	0,
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(1.918.377.592,)
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,
208	Pengembangan Melalui KDP	0,
209	Transaksi Normalisasi BMN	0,
221	Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi	0,
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	0,
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	0,
225	Koreksi Kesalahan input IP	(99.862.109.000,)
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	0,
232	Koreksi Transfer Masuk	(99.187.361.000,)
237	Koreksi BMN ditemukan Kembali	0,
238	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,
245	Koreksi Nilai barang Berlebih	700.284.000,
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0,
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	0,
301	Penghapusan	0,
302	Transfer Keluar	(608.236.680.022,)
304	Reklasifikasi Keluar	0,
305	Koreksi Pencatatan	0,



Kode	Uraian Transaksi	Irigasi
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
307	Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	0,
321	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,
331	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	0,
334	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	99.187.361.000,
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0,
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
393	Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
394	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
395	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	0,
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	0,
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(33.480.000,)
	Jumlah	913.182.643.328,

Mutasi transaksi terhadap Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Jaringan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
000	Saldo Awal	18.449.444.475,
100	Koreksi Saldo Awal	0,
101	Pembelian	50.000.000,
102	Transfer Masuk	14.106.775.275,
103	Hibah (Masuk)	370.692.240,
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,
107	Reklasifikasi Masuk	882.794.027,
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0,
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	0,
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	0,
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	0,
202	Pengembangan Nilai Aset	0,
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0,
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,
208	Pengembangan Melalui KDP	93.250.000,
209	Transaksi Normalisasi BMN	0,
221	Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi	0,
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	0,
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	0,
225	Koreksi Kesalahan input IP	0,
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	0,
232	Koreksi Transfer Masuk	0,
237	Koreksi BMN ditemukan Kembali	0,
238	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,
245	Koreksi Nilai barang Berlebih	0,
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0,
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	0,
301	Penghapusan	0,
302	Transfer Keluar	(14.106.775.275,)
304	Reklasifikasi Keluar	0,
305	Koreksi Pencatatan	0,
307	Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	0,



Kode	Uraian Transaksi	Jaringan
a	b	c
321	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,
331	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	0,
334	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	0,
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0,
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
393	Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
394	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
395	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	0,
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	0,
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0,
	Jumlah	19.846.180.742,

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan, diantaranya berasal dari transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk sebesar Rp(3.405.743.690.648,00) dan Rp3.403.475.977.320,00 yang disebabkan oleh perubahan Organisasi pada Satker Direktorat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai amanat dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya nilai Hibah Masuk sebesar Rp5.171.457.816,00 berasal dari pengalihan Aset P3D untuk Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang tercatat pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Koreksi Transfer Masuk atas Koreksi Hasil Penilaian Kembali dengan nilai yang signifikan terdapat pada Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat senilai Rp2.054.774.752.000,00.

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp409.956.523.197,00 dan Rp392.740.756.147,00.

Rincian Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:



Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
Aset Tetap Renovasi	386.479.991.388	369.286.224.338	17.193.767.050	4,66
Aset Tetap Lainnya	23.476.531.809	23.454.531.809	22.000.000	0,09
Jumlah	409.956.523.197	392.740.756.147	17.215.767.050	4,38

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Renovasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Aset Tetap Renovasi
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
000	Saldo Awal	369.286.224.338,
100	Koreksi Saldo Awal	0,
101	Pembelian	0,
102	Transfer Masuk	52.553.296.016,
103	Hibah (Masuk)	0,
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	16.221.277.050,
107	Reklasifikasi Masuk	3.483.230.000,
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0,
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	0,
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	0,
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	0,
202	Pengembangan Nilai Aset	2.990.412.000,
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0,
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,
208	Pengembangan Melalui KDP	0,
209	Transaksi Normalisasi BMN	0,
221	Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi	0,
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	0,
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	0,
225	Koreksi Kesalahan input IP	0,
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	0,
232	Koreksi Transfer Masuk	0,
237	Koreksi BMN ditemukan Kembali	0,
238	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,
245	Koreksi Nilai barang Berlebih	0,
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0,
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	0,
301	Penghapusan	0,
302	Transfer Keluar	(49.047.851.000,)
304	Reklasifikasi Keluar	(5.501.152.000,)
305	Koreksi Pencatatan	0,
307	Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	0,
321	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,
331	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	0,
334	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	0,
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0,
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	0,



Kode	Uraian Transaksi	Aset Tetap Renovasi
a	b	c
393	Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
394	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
395	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	0,
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	0,
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(3.505.445.016,)
	Jumlah	386.479.991.388,

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Aset Tetap Lainnya
a	b	c
000	Saldo Awal	23.454.531.809,
100	Koreksi Saldo Awal	0,
101	Pembelian	0,
102	Transfer Masuk	21.486.456.399,
103	Hibah (Masuk)	0,
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,
107	Reklasifikasi Masuk	22.000.000,
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0,
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	0,
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	0,
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	0,
202	Pengembangan Nilai Aset	0,
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0,
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,
208	Pengembangan Melalui KDP	0,
209	Transaksi Normalisasi BMN	0,
221	Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi	0,
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	0,
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	0,
225	Koreksi Kesalahan input IP	0,
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	0,
232	Koreksi Transfer Masuk	0,
237	Koreksi BMN ditemukan Kembali	0,
238	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,
245	Koreksi Nilai barang Berlebih	0,
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0,
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	0,
301	Penghapusan	0,
302	Transfer Keluar	(21.486.456.399,)
304	Reklasifikasi Keluar	0,
305	Koreksi Pencatatan	0,
307	Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	0,
321	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,
331	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	0,
334	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	0,
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0,
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	0,



Kode	Uraian Transaksi	Aset Tetap Lainnya
a	b	c
393	Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
394	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
395	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	0,
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	0,
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0,
	Jumlah	23.476.531.809,

Mutasi Aset Tetap Lainnya diantaranya berasal dari transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk sebesar Rp(70.534.307.399,00) dan Rp74.039.752.415,00 yang disebabkan oleh perubahan Organisasi pada Satker Direktorat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai amanat dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp16.221.277.050,00 yang berasal dari kegiatan Rehabilitasi/Renovasi dan Pembangunan Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimana aset tersebut masih dalam proses pengalihan dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Rincian Aset Tetap Renovasi terdapat pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp738.212.141.860,00 dan Rp387.563.873.627,00 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.



C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp(5.123.555.562.473,00) dan Rp(3.506.064.956.015,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4	5
1	Tanah	2.119.082.742.102	-	2.119.082.742.102
2	Peralatan dan Mesin	7.552.775.839.186	3.939.079.280.868	3.613.696.558.318
3	Gedung dan Bangunan	3.039.673.353.779	407.603.090.185	2.632.070.263.594
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.282.802.484.940	775.287.193.806	1.507.515.291.134
5	Aset Tetap Lainnya	409.956.523.197	1.585.997.614	408.370.525.583
Total		15.404.290.943.204	5.123.555.562.473	10.280.735.380.731

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.042.741.026.288,00 dan Rp971.107.422.889,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:



*Rincian Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET TAK BERWUJUD				
Patent	-	23.167.000	(23.167.000)	(100,00)
Software	27.102.258.140	7.296.766.140	19.805.492.000	271,43
Lisensi	306.955.000	306.955.000	-	-
Hasil Kajian/Penelitian	465.777.677.167	413.864.021.208	51.913.655.959	12,54
Aset Tak Berwujud Lainnya	549.554.135.981	549.616.513.541	(62.377.560)	(0,01)
Jumlah	1.042.741.026.288	971.107.422.889	71.633.603.399	7,38

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Aset Tak Berwujud
a	b	c
000	Saldo Awal	971.084.255.889,
100	Koreksi Saldo Awal	0,
101	Pembelian	2.410.894.750,
102	Transfer Masuk	870.061.886.099,
103	Hibah (Masuk)	0,
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	94.644.574.099,
107	Reklasifikasi Masuk	3.309.377.500,
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	1.081.580.500,
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	0,
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	0,
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	6.000.000,
202	Pengembangan Nilai Aset	119.130.000,
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(23.554.000,)
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,
208	Pengembangan Melalui KDP	0,
209	Transaksi Normalisasi BMN	(8.995.426.000,)
221	Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi	0,
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	0,
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	0,
225	Koreksi Kesalahan input IP	0,
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	0,
232	Koreksi Transfer Masuk	0,
237	Koreksi BMN ditemukan Kembali	0,
238	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,
245	Koreksi Nilai barang Berlebih	0,
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0,
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	0,



Kode	Uraian Transaksi	Aset Tak Berwujud
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
301	Penghapusan	0,
302	Transfer Keluar	(721.163.626.009,)
304	Reklasifikasi Keluar	(5.466.581.500,)
305	Koreksi Pencatatan	(9.752.779.950,)
307	Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	0,
321	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,
331	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	0,
334	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	0,
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0,
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
393	Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
394	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	0,
395	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	0,
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	0,
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(154.574.705.090,)
	Jumlah	1.042.741.026.288,

Rincian Aset Tak Berwujud terdapat pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.22 Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp2.836.426.856.810,00 dan Rp3.394.793.394.001,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta dalam proses penghapusan dari BMN.



Rincian Aset Lain-lain
per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET LAIN-LAIN				
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	2.639.623.903.820	3.201.943.615.011	(562.319.711.191)	(17,56)
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	196.802.952.990	192.849.778.990	3.953.174.000	2,05
Jumlah	2.836.426.856.810	3.394.793.394.001	(558.366.537.191)	(16,45)

Mutasi transaksi terhadap Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Aset Lainnya
a	b	c
000	Saldo Awal	3.394.793.394.001,
100	Koreksi Saldo Awal	0,
101	Pembelian	0,
102	Transfer Masuk	0,
103	Hibah (Masuk)	0,
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,
107	Reklasifikasi Masuk	0,
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0,
121	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	0,
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	0,
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	757.290.212.685,
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	0,
202	Pengembangan Nilai Aset	0,
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0,
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,
208	Pengembangan Melalui KDP	0,
209	Transaksi Normalisasi BMN	0,
221	Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi	0,
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	0,
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	0,
225	Koreksi Kesalahan input IP	0,
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	0,
232	Koreksi Transfer Masuk	0,
237	Koreksi BMN ditemukan Kembali	0,
238	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,
245	Koreksi Nilai barang Berlebih	0,
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0,
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	(7.811.411.831,)
301	Penghapusan	0,
302	Transfer Keluar	0,



Kode	Uraian Transaksi	Aset Lainnya
a	b	c
304	Reklasifikasi Keluar	0,
305	Koreksi Pencatatan	0,
307	Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	0,
321	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,
331	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	0,
334	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	0,
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(27.360.957.000,)
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(750.689.425.210,)
393	Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	(3.641.000.000,)
394	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	(525.361.242.835,)
395	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	(742.813.000,)
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(49.900.000,)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0,
	Jumlah	2.836.426.856.810,

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp2.639.623.903.820,00, terdiri dari Barang yang Rusak Berat sebesar Rp3.522.895.012,00; Barang yang akan direklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp63.443.056.335,00 dan Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sebesar Rp2.572.657.952.473,00.

Dari nilai Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sebesar Rp2.572.657.952.473,00 dapat diklasifikasikan ke dalam Dermaga Penyeberangan sebesar Rp2.028.968.719.188,00; Kapal Penyeberangan sebesar Rp286.938.393.372,00, Bus sebesar Rp4.941.787.500,00; Rambu sebesar Rp126.345.103.612,00; *Area Traffic Control System* (ATCS) sebesar Rp36.602.329.800,00; dan Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat lainnya sebesar Rp88.861.619.001,00.



*Rincian Jenis Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/
Pemerintah Daerah yang tercatat dalam Aset Tetap yang
tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah
(dalam rupiah)*

No.	Jenis Barang	Nilai
1.	Dermaga Penyeberangan	2.028.968.719.188
2.	Kapal Penyeberangan	286.938.393.372
3.	Bus	4.941.787.500
4.	Rambu	126.345.103.612
5.	Area Traffic Control System (ATCS)	36.602.329.800
6.	Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Lainnya	88.861.619.001
Total		2.572.657.952.473

Saldo Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah yang tercatat dalam Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Masih dalam proses pengajuan pemindahtanganan sebesar Rp2.024.361.905.459,00;
- b. Sudah proses pengajuan pemindahtanganan sebesar Rp354.266.428.185,00; dan
- c. Barang tersebut direncanakan untuk dihapuskan sebesar Rp194.029.618.829,00.

Rincian proses pemindahtanganan terhadap barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. Dermaga Penyeberangan

Dari nilai Dermaga Penyeberangan sebesar Rp2.028.968.719.188,00, terdapat Dermaga yang sudah diusulkan permohonan pemindahtanganan sebesar Rp314.147.151.000,00 atau sebesar 15,48%, direncanakan akan dihapuskan sebesar Rp6.718.752.000,00 atau sebesar 0,33% dan masih dalam proses



pengajuan pemindahtanganan sebesar Rp1.708.102.816.188,00 atau sebesar 84,19%.

b. Kapal Penyeberangan

Dari nilai Kapal Penyeberangan sebesar Rp286.938.393.372,00, terdapat Kapal yang sudah diusulkan permohonan pemindahtanganan sebesar Rp32.256.692.375,00 atau sebesar 11,24%, direncanakan akan dihapuskan sebesar Rp30.021.849.000,00 atau sebesar 10,46% dan masih dalam proses pengajuan pemindahtanganan sebesar Rp224.659.851.997,00 atau sebesar 78,30%.

c. Bus

Dari nilai Bus sebesar Rp4.941.787.500,00, terdapat Bus yang direncanakan akan dihapuskan sebesar Rp91.337.500,00 atau sebesar 1,85% dan masih dalam proses pengajuan pemindahtanganan sebesar Rp4.850.450.000,00 atau sebesar 98,15%.

d. Rambu

Terhadap nilai Rambu sebesar Rp126.345.103.612,00, seluruhnya direncanakan untuk dihapuskan.

e. Area Traffic Control System (ATCS)

Dari nilai Area Traffic Control System (ATCS) sebesar Rp36.602.329.372,00, terdapat ATCS yang sudah diusulkan permohonan pemindahtanganan sebesar Rp7.862.584.810,00 atau sebesar 21,48% dan masih dalam proses pengajuan pemindahtanganan sebesar Rp28.739.744.990,00 atau sebesar 78,52%.

f. Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya

Dari nilai Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Lainnya sebesar Rp88.861.619.001,00, telah direncanakan untuk dihapuskan sebesar Rp30.852.576.717,00 atau sebesar 34,72%



dan masih dalam proses pengajuan pemindahtanganan sebesar Rp58.009.042.284,00 atau sebesar 65,28%.

Rincian Aset Lain-lain terdapat pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp(731.057.798.711,00) dan Rp(824.764.095.579,00).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4	5
1	Aset Tak Berwujud	1.042.741.026.288	9.208.010.633	1.033.533.015.655
2	Aset Lain-Lain	2.836.426.856.810	721.849.788.078	2.114.577.068.732
Total		3.879.167.883.098	731.057.798.711	3.148.110.084.387

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp49.986.250,00 dan Rp55.789.800,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Saldo Uang Muka dari KPPN terdapat pada Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan yang merupakan sisa Uang



Persediaan (UP) Tahun 2019 yang baru dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada tanggal 08 Januari 2020 dengan NTPN: DC67A1JNEPEE50CD.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp3.409.805.650,00 dan Rp7.209.762.607,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Pada Deputy Administrasi, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, dan kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA				
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	3.845.320.307	(3.845.320.307)	(100,00)
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	566.499.650	474.374.650		
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	2.843.306.000	2.890.067.650		
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	3.409.805.650	7.209.762.607	(3.845.320.307)	(53,33)

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga terdapat pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.



C.26 Hibah Langsung yang belum disahkan

Nilai Hibah Langsung yang belum disahkan per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Hibah yang belum disahkan ini merupakan Pendapatan Hibah Langsung yang belum mendapatkan persetujuan/pengesahan dari KPPN sampai dengan 31 Desember 2019.

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN.

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Nilai Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.29 Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp20.332.749.464.060,00 dan Rp24.792.217.479.555,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.379.779.764.827,00 dan Rp963.840.029.331,00. Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 43,13 persen dibandingkan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2018. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan Rincian Pendapatan PNB
31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
Pendapatan PNB Lainya			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan BMN			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	19.100.100	225.555.000	(91,53)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	192.426.262	290.421.900	(33,74)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	3.746.841.857	749.910.200	399,64
Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN	3.958.368.219	1.040.332.100	280,49
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	21.943.150.002	7.142.650.000	207,21
Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.327.042.275.000	938.634.625.000	41,38
Pendapatan Jasa Kepelabuhan	4.373.928.682	4.195.321.400	4,26
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kelautan	170.000	-	-
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	10.562.675.000	10.031.450.002	5,30
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	26.688	(100,00)
Jumlah Pendapatan Jasa	1.363.922.198.684	960.004.073.090	42,07
Pendapatan Denda			
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	8.381.200		
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	12.110.724.253	2.766.895.654	337,70
Pendapatan Denda Lainnya	-	55.859	(100,00)
Jumlah Pendapatan Denda	12.110.724.253	2.766.951.513	337,69
Pendapatan Lain-Lain			
Penerimaan Kembali Persekot/uang Muka Gaji	-	1.178.000	(100,00)
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	33	317.916.528	(100,00)
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	33	319.094.528	(100,00)
Jumlah	1.379.991.291.189	964.130.451.231	43,13



D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp453.101.878.396,00 dan Rp435.497.399.326,00.

*Perbandingan Rincian Beban Pegawai
31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	166.044.863.620	160.242.583.010	0,04
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(16.398.222)	(6.215.400)	1,64
Beban Pembulatan Gaji PNS	2.764.952	2.529.791	0,09
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(564.107)	(37.969)	13,86
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	13.608.821.870	13.210.118.462	0,03
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	(1.582.960)	(428.040)	2,70
Beban Tunj. Anak PNS	4.035.933.152	4.012.329.888	0,01
Beban Tunj. Struktural PNS	2.457.080.000	2.440.970.000	0,01
Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	(650.828)	(85.608)	6,60
Beban Tunj. Fungsional PNS	198.205.000	196.150.000	0,01
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	428.275.998	194.936.886	1,20
Beban Tunj. Beras PNS	9.453.548.260	9.775.760.250	(0,03)
Pengembalian Beban Tunjangan Beras PNS	(1.231.140)	-	-
Beban Uang Makan PNS	27.155.688.890	26.640.297.043	0,02
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	(808.450)	(2.760.000)	(0,71)
Beban Tunjangan Umum PNS	8.613.165.000	8.762.045.000	(0,02)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(1.850.000)	(1.990.000)	(0,07)
Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	-	-	-
Beban Uang Lembur	11.758.257.936	4.021.182.000	1,92
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	209.401.877.175	206.018.346.013	0,02
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	(33.517.750)	(8.332.000)	3,02
Beban Pegawai Transito	-	-	-
Jumlah	453.101.878.396	435.497.399.326	0,04



Terdapat selisih antara Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional senilai Rp14.776.037.875,00. Hal tersebut disebabkan karena Pengakuan Pendapatan yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah sedangkan Pendapatan yang dilaporkan dalam Laporan Operasional berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan yang diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran namun tidak dicatat dalam Laporan Operasional, antara lain Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp19.100.100,00, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya senilai Rp192.426.262,00, Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga senilai Rp127.376.012,00, serta Penerimaan Kembali Belanja Pegawai, Barang dan Modal Tahun Anggaran yang Lalu senilai Rp 14.437.135.501,00.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp43.873.200.310,00 dan Rp41.319.470.717,00.

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan
31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	41.729.540.577	39.365.719.263	6,00
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	29.004.300	10.523.500	175,61
Beban Persediaan Bahan Baku	1.284.632.968	1.548.227.306	(17,03)
Beban Persediaan Lainnya	830.022.465	395.000.648	110,13
Jumlah	43.873.200.310	41.319.470.717	6,18



D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.269.413.220.613,00 dan Rp1.181.066.927.560,00. Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 7,63 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:



Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	152.855.939.715	102.965.440.519	48,45
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	(9.142.600)	(15.352.900)	(40,45)
Beban Pengadaan Bahan Makanan	894.166.000	881.021.000	1,49
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	13.943.181.352	17.957.623.222	(22,36)
Pengembalian Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	599.172.326	301.086.147	99,00
Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	(466.500)	(100,00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	13.512.558.200	12.020.002.250	12,42
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(17.760.000)	(24.185.500)	(26,57)
Beban Barang Operasional Lainnya	194.256.219.376	124.593.573.841	55,91
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	(3.168.000)	(17.605.196)	(82,01)
Beban Bahan	11.198.521.038	14.820.782.256	(24,44)
Pengembalian Beban Bahan	-	(26.917.210)	(100,00)
Beban Honor Output Kegiatan	69.877.779.017	85.553.220.732	(18,32)
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(25.200.000)	(180.303.006)	(86,02)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	686.010.655.412	699.490.928.303	(1,93)
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	(10.513.000)	(4.000.000)	162,83
Beban Langganan Listrik	7.084.938.710	5.162.455.116	37,24
Pengembalian Beban Langganan Listrik	-	(6.231.621)	(100,00)
Beban Langganan Telepon	1.317.605.596	921.346.613	43,01
Pengembalian Beban Langganan Telepon	-	(1.989.048)	(100,00)
Beban Langganan Air	693.244.609	359.938.463	92,60
Pengembalian Beban Langganan Air	-	(1.474.220)	(100,00)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	19.162.011.118	15.189.706.641	26,15
Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	(653.900)	(100,00)
Beban Jasa Konsultan	1.123.054.000	167.400.000	570,88
Beban Sewa	73.184.623.834	55.138.202.486	32,73
Pengembalian Beban Sewa	(12.720.000)	-	0,00
Beban Jasa Profesi	8.510.598.500	8.831.542.800	(3,63)
Pengembalian Beban Profesi	(24.700.000)	-	0,00
Beban Jasa Lainnya	14.391.436.010	36.112.668.025	(60,15)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	900.719.400	1.572.427.137	(42,72)
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	59.894.400	(100,00)
Jumlah	1.269.413.220.613	1.181.820.080.850	7,41



D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp100.145.147.151,00 dan Rp208.935.792.232,00.

Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.957.393.957	121.701.796.632	(67,99)
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	(7.453.000)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	398.997.500	2.677.441.000	(85,10)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.799.142.808	63.129.904.789	(19,53)
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	(34.984.705)	(100,00)
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	780.361.531	431.378.046	80,90
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	805.190.900	464.167.429	73,47
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	942.142.676	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	5.993.310.606	19.636.061.287	(69,48)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	966.785.641	472.741.746	104,51
Beban Persediaan suku cadang	483.831.532	123.703.779	291,12
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	17.990.000	341.035.229	(94,72)
Jumlah	100.145.147.151	208.935.792.232	(52,07)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp222.022.525.882,00 dan Rp240.315.617.355,00.



Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	165.638.613.627	183.529.195.340	(9,75)
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(245.686.445)	(673.506.986)	(63,52)
Beban Perjalanan Tetap	1.068.721.095	1.227.231.034	(12,92)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.569.427.320	2.663.514.581	(3,53)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.528.409.159	13.651.175.037	(0,90)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	33.678.606.050	36.009.551.411	(6,47)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	(30.000.250)	(100,00)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	5.892.223.396	3.938.457.188	49,61
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	(107.788.320)	-	-
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	-	-	-
Jumlah	222.022.525.882	240.315.617.355	(7,61)

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp193.245.441.775,00 dan Rp37.112.369.000,00.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah terdapat pada Direktorat Angkutan Jalan; Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi atas Hibah Keluar Bus, dan Dermaga Penyeberangan sebagaimana dokumen Berita Acara Serah Terima dan Surat Keputusan Penghapusan terdapat pada Lampiran XIV



dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.961.110.452.489,00 dan Rp1.260.135.199.186,00.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.088.312.729.280	881.496.590.595	23,46
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	86.627.801.641	49.262.894.102	75,85
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	57.528.309.075	59.057.199.239	(2,59)
Beban Penyusutan Irigasi	573.360.801.189	45.844.390.233	1.150,67
Beban Penyusutan Jaringan	480.933.388	142.806.249	236,77
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.310.113.766	270.383.848	384,54
Beban Amortisasi Paten	1.158.350	2.316.700	(50,00)
Beban Amortisasi Software	2.831.776.875	910.399.229	211,05
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	4.850.000	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	150.651.978.925	223.148.218.991	(32,49)
Jumlah	1.961.110.452.489	1.260.135.199.186	55,63



D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.418.759.500,00 dan Rp0,00.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih terdapat pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan yang berasal dari penyisihan sebesar 5‰ (lima permill) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar atau $5/1000 \times$ Rp683.751.900.000,00 atau sebesar Rp3.418.759.500,00.

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)*

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	211.526.362	515.976.900	(59,00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(44.528.565.605)	(39.236.103.855)	13,49
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	674.348.528.139	1.054.653.354.147	(36,06)
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya	(838.491.063.323)	(971.194.682.461)	(13,66)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(208.459.574.427)	44.738.544.731	(565,95)



E. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp24.792.217.479.555,00 dan Rp22.835.121.491.560,00.

E.2 SURPLUS (DEFISIT) – LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.075.010.435.716,00 dan Rp2.396.230.201.314,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH (MENGURANGI) EKUITAS

E.4.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

E.4.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp388.550.354,00 dan Rp490.406.194,00.



E.4.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp443.160.618.924,00 dan Rp0,00.

E.4.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp(4.681.683.482.442,00) dan Rp(190.671.104.356,00).

E.4.6 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(406.831.519.361,00) dan Rp9.659.790.021,00.

E.4.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp683.736.066.300,00 dan Rp42.970,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.576.772.186.446,00 dan Rp4.533.487.140.420,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang



berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.763.977.876.216
Diterima dari Entitas Lain	(1.394.555.802.702)
Transfer Keluar	(7.023.318.272.177)
Transfer Masuk	6.933.035.499.542
Pengesahan Hibah Langsung	297.632.885.567
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	2.576.772.186.446

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp(1.394.555.802.702,00) sedangkan DKEL sebesar Rp3.763.977.876.216,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.933.035.499.542,00. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp(7.023.318.272.177,00).

Transaksi Transfer Masuk/Transfer Keluar memiliki Nilai yang cukup signifikan disebabkan oleh Proses Perubahan Organisasi pada 5 (lima) Satuan Kerja Direktorat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan Keputusan Direktur Jenderal



Perhubungan Darat Nomor KP.903/KU.401/DRJD/2019 tentang Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Selanjutnya, masih terdapat selisih Transfer Masuk/Transfer Keluar sebesar Rp90.282.772.635,00. Selisih Transfer Masuk/Transfer Keluar tersebut, disebabkan oleh:

1. Transfer Keluar Bangunan Talud Penahan yang terletak di Kabupaten Samosir, dengan total nilai perolehan sebesar Rp12.573.862.000,00 yang diserahkan kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Surat Persetujuan Alih Status Menteri Keuangan Nomor S-33/MK.06.WKN.02/2019 tanggal 11 Juli 2019; dan
2. Transfer Keluar Tanah yang terletak di Jalan Salemba Tengah II No. 10, Kel. Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, dengan nilai wajar sebesar Rp78.464.680.000,00 yang diserahkan kepada Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor BA.311/PL.301/DJPD/2019 dan BA.293 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019.

Rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar terdapat pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp297.632.885.567,00.



Pengesahan Hibah Langsung berasal dari Hibah Masuk Aset dari Pengalihan Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

E.5 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp20.332.749.464.060,00 dan Rp24.792.217.479.555,00.



F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Perubahan Organisasi pada Direktorat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Bahwa untuk menata organisasi dan tata kerja, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka dilakukan reorganisasi pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Entitas Lama	Entitas Baru	Keterangan
Direktorat Sarana Perhubungan Darat	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	Penyesuaian Tugas, Fungsi dan perubahan Nomenklatur
Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Penyesuaian Tugas, Fungsi dan perubahan Nomenklatur
Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat	Direktorat Lalu Lintas Jalan	Penyesuaian Tugas, Fungsi dan perubahan Nomenklatur
Direktorat Angkutan dan Multimoda	Direktorat Angkutan Jalan	Penyesuaian Tugas, Fungsi dan perubahan Nomenklatur
Direktorat Pembinaan Keselamatan	-	Satker Dilikuidasi
-	Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	Satker Baru

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.903/KU.401/DRJD/2019 tentang Penanggung Jawab Proses Likuidasi Entitas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, telah dilaksanakannya transfer Barang Milik Negara dan likuidasi dalam rangka perubahan organisasi pada Direktorat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.903/KU.401/DRJD/2019 dan Berita Acara Serah Terima Likuidasi terdapat pada Lampiran XVII dan Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.



F.2 Kebijakan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) *“Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah.”*
- (2) *“Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.”*

Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset tetap:

1. Tanah,
2. Gedung dan Bangunan,
3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi:
 - a. Jalan dan jembatan; dan
 - b. Bangunan Air.

pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN yang dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/ Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-761/Mk.06/2017 tanggal 14 September 2017 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan pencanangan pada tanggal 29 Agustus 2017.



Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei untuk objek penilaian selain Tanah.

Untuk UAPPB-Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pelaksanaan Penilaian Kembali BMN mulai 2017 dan selesai tahun 2018. Hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, sebanyak 10 (sepuluh) Satker telah melakukan Penilaian Kembali BMN yang terdiri dari 176 (seratus tujuh puluh enam) NUP dengan total nilai kenaikan/(penurunan) nilai BMN sebesar Rp5.106.412.984.563,00 yang berasal dari nilai buku tercatat (administrasi) sebesar Rp1.284.195.426.437,00 dan nilai wajar hasil penilaian sebesar Rp6.390.608.411.000,00.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian Kembali pada Tahun 2018 dengan hasil sebanyak 6 (enam) Satker telah melakukan Penilaian Kembali BMN yang terdiri dari 399 NUP dengan total nilai kenaikan/penurunan sebesar Rp12.203.593.675,00 yang berasal dari nilai buku tercatat (administrasi) sebesar Rp202.992.634.931,00 dan nilai koreksi hasil penilaian sebesar Rp(190.671.104.356,00).

Rincian rekapitulasi hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali (IP) BMN terdapat pada Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.



F.3 Pelimpahan Kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Proses Pelimpahan Kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) bidang transportasi darat berupa Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

a. Terminal Tipe A

Sudah Register	Proses BAST	Inventarisasi Akhir	Inventarisasi Awal	Tidak Diserahkan	Total Terminal Tipe A
81	20	9	7	28	145

Dari 145 Terminal Tipe A, terdapat 81 Terminal Tipe A yang telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dan telah tercatat sebagai aset Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana terlampir, 20 Terminal Tipe A dalam proses Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), 9 Terminal Tipe A masih pada tahap Inventarisasi Akhir (Proses penyusunan BAST), 7 Terminal Tipe A yang sedang pada proses inventarisasi awal dimana Pemerintah Daerah masih belum memastikan rincian aset yang akan diserahkan dan 28 Terminal Tipe A tidak diserahkan dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal	Permasalahan
1	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Terminal Kp. Rambutan	Terminal Tipe A yang Termasuk dalam wilayah kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Aset Diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
2	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Terminal Pulo Gebang	
3	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Barat	Terminal Kalideres	
4	Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor	Terminal Baranngnangsiang	
5	Provinsi Jawa Barat	Kota Bekasi	Terminal Induk Bekasi	



No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal	Permasalahan
6	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bekasi	Terminal Kalijaya Cikarang	Terminal Tipe A yang Termasuk dalam wilayah kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Aset Diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
7	Provinsi Jawa Barat	Kota Depok	Terminal Jatijajar	
8	Provinsi Banten	Kota Tangerang	Terminal Poris Plawad	
9	Provinsi Banten	Kota Tangerang Selatan	Terminal Pondok Cabe	
10	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Majene	Terminal Majene	Tidak termasuk dalam simpul Terminal Tipe A sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tahun 2003 dan tidak termasuk dalam rencana penetapan lokasi Terminal Tipe A
11	Provinsi Bali	Kabupaten Gianyar	Terminal Gianyar	
12	Provinsi Bali	Kabupaten Buleleng	Terminal Banyuasri	
13	Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	Terminal Kota Bangun	
14	Provinsi Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara	Terminal Arga Makmur	
15	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Mandailing Natal	Terminal Penyabungan	
16	Provinsi Bali	Kota Denpasar	Terminal Ubung	Terminal beralih fungsi menjadi Terminal Tipe C
17	Provinsi Jambi	Kota Sungai Penuh	Terminal Sungai Penuh	Terminal beralih fungsi menjadi kantor Pemerintah Kota Sungai Penuh
18	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Wonosobo	Terminal Sapen	Terminal beralih fungsi menjadi SPBU
19	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	Terminal Terboyo	Terminal beralih fungsi menjadi tempat parkir kendaraan barang
20	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Banjarnegara	Terminal Banjarnegara	Terminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B dan sudah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
21	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Situbondo	Terminal Situbondo	Terminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B dan sudah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
22	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Pamekasan	Terminal Ronggosukowati	Terminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B dan sudah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
23	Provinsi NTB	Kabupaten Lombok Barat	Terminal Sweta	Terminal beralih fungsi menjadi lahan kosong



No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal	Permasalahan
24	Provinsi NTT	Kabupaten Belu	Terminal Motoain	Terminal beralih fungsi menjadi kantor PLBN
25	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado	Terminal Malalayang	Terminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B. Sudah digantikan oleh terminal Liwas
26	Provinsi Bali	Kabupaten Karangasem	Terminal Karangasem	Merupakan Terminal Tipe C
27	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Muara Enim	Terminal Muara Enim	Setelah dilakukan evaluasi teknis oleh tim teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Terminal Regional Muara Enim dinyatakan tidak layak sebagai Terminal Tipe A. saat ini terminal hanya digunakan sebagai lahan parkir
28	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Labuhan Batu	Terminal Padang Bulan	Berdasarkan Surat No 550/5/28/Dishub/2018 Pemkab Labuhan Batu akan menggunakan terminal tersebut sebagai perkantoran organisasi perangkat daerah Kab Labuhan Batu serta menyarakan kemenhub untuk mencari lahan pengganti guna dibangun Terminal Tipe A

b. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Sudah Register	Proses BAST	Inventarisasi Akhir	Inventarisasi Awal	Tidak Diserahkan	Total UPPKB
102	16	16	7	6	141

Dari total jumlah 141 UPPKB, terdapat 103 UPPKB yang telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dan telah tercatat sebagai aset Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana terlampir pada *Lampiran Vb*, terdapat 16 UPPKB yang sedang proses Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) , 16 UPPKB yang masih dalam proses Inventarisasi Akhir (Proses Penyusunan BAST), 7 UPPKB masih dalam proses inventarisasi awal dimana Pemerintah Daerah masih belum memastikan rincian aset yang akan diserahkan dan 6 tidak diserahkan dengan penjelasan sebagai berikut:



No	Provinsi	Nama UPPKB	Justifikasi
1	Riau	Tarantang Manuk	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Palalawan, akan beralih fungsi.
2	Jawa Tengah	Butuh	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Purworejo, Sudah Tidak Beroperasi.
3	Jawa Tengah	Tugu	Lahan Milik Pemerintah Kota Semarang, akan beralih fungsi.
4	Jawa Tengah	Katon Sari	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Demak, Sudah Tidak Beroperasi.
5	Bengkulu	Air Sebakul	Lahan Milik Pemerintah Kota Bengkulu. Lokasinya tidak strategis sehingga tidak efektif untuk dioperasikan. UPPKB akan beralih fungsi.
6	Sulawesi Utara	Amurang	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, akan beralih fungsi.

F.4 Hibah Masuk

Sampai dengan 31 Desember 2019, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerima Hibah Masuk dari Pemerintah Kota/Kabupaten dan Provinsi terkait Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui Proses Pelimpahan Kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) bidang transportasi darat berupa Terminal Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Sampai dengan 31 Desember 2019, Hibah Masuk di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdapat pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat senilai Rp1.830.583.367.375,00 yang terdiri dari uraian sebagai berikut.

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Tanah	732.090.494.765
2.	Peralatan dan Mesin	74.931.526.568
3.	Gedung dan Bangunan	928.389.911.261
4.	Jalan dan Jembatan	79.142.870.145
5.	Irigasi	12.487.076.234
6.	Jaringan	2.993.095.002
7.	Aset Tetap Lainnya	310.818.400
8.	Aset Tak Berwujud	237.575.000
Total Keseluruhan Hibah		1.830.583.367.375



F.5 Perlakuan Akuntansi Persediaan Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Menunjuk surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-4951/PB/2018 tanggal 25 Juli 2018, perlakuan atas Persediaan yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

“Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, Persediaan didefinisikan sebagai aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.”

Dengan demikian Persediaan yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk barang yang perolehannya lebih dari satu tahun, seharusnya dicatat sebagai persediaan.

Selain itu, merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, pada Pasal 47 diatur mengenai perlakuan atas BMN untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebagai berikut:

1. Dalam hal Barang Milik Negara (BMN) berada dalam penguasaan Pengguna Barang (PB)/Kuasa Pengguna Barang (KPB), atas BMN Persediaan yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemda ditatausahakan sebagai aset lancar berupa persediaan oleh PB/KPB.
2. Dalam hal Barang Milik Negara (BMN) tersebut tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang (PB)/Kuasa Pengguna Barang (KPB) namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan/serah terima masih dalam proses:
 - a. dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak dikuasai;
 - b. tidak disajikan dalam Neraca;



- c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN (CaLBMN) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
 - d. ketentuan di atas dilakukan setelah PB/KPB mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. dalam hal Pengelola Barang telah menerbitkan Keputusan Penghapusan atas BMN, KPB menghapus BMN persediaan tersebut dari Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan pemindahtanganan BMN tersebut, PB/KPB mengeluarkan BMN tersebut dari Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai, menyajikan BMN tersebut ke dalam Neraca, selanjutnya melakukan penatausahaan sebagai aset lancar berupa persediaan.
- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4951/PB/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal Tanggapan atas Persediaan yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdapat pada Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

F.6 Perlakuan Akuntansi Aset Perlengkapan Jalan

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 4303/AJ.002/DRJD/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Perlengkapan Jalan disebutkan bahwa Perlengkapan Jalan adalah fasilitas pada suatu jalan yang ditempatkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan. Perlengkapan Jalan terdiri atas Alat Pemberi Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Penerangan Jalan, Pagar Pengaman, Cermin Tikungan, Patok Lalu Lintas, Pita Penggaduh, Alat Pengendali Pengguna Jalan, dan Alat Perlengkapan Jalan Lainnya.

Sampai dengan 30 Juni 2019 nilai Perlengkapan Jalan (kode barang 3.18) sebesar Rp3.491.745.085.319,00. Sampai dengan Tahun 2019, BMN berupa Perlengkapan Jalan terus meningkat setiap tahunnya karena tidak proses inventarisasi dan penghapusan aset. Inventarisasi



dan Penghapusan Perlengkapan Jalan masih terkendala karena Perlengkapan Jalan masih tercatat secara nilai gelondongan per paket pekerjaan. Terhadap BMN berupa Perlengkapan Jalan yang masih tercatat secara gelondongan, perlu dilakukan perbaikan pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan BMN berupa Perlengkapan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan upaya penyelesaian BMN berupa Perlengkapan Jalan yang seharusnya dihapuskan dari SIMAK BMN. Namun perlengkapan jalan tidak bisa dihapuskan karena masih tercatat secara gelondongan per paket pekerjaan. Perlengkapan Jalan perlu dilakukan perbaikan pencatatan per NUP dan jenis barang sehingga bisa dihapuskan. Atas dasar tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5238/PL.201/DRJD/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Perlengkapan Jalan. Perdirjen KP.5238/PL.201/DRJD/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Perlengkapan Jalan mengatur Pengelolaan BMN berupa Perlengkapan Jalan yang meliputi Perencanaan, Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, serta Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.

Dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5238/PL.201/DRJD/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Perlengkapan Jalan, Perlengkapan Jalan diklasifikasikan sesuai dengan kriteria Belanja Barang (52) dan Belanja Modal (53). Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual suatu belanja dapat dikategorikan Belanja Modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah aset pemerintah;
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya;
3. Pengeluaran tersebut tidak diniatkan bukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak lainnya.



Menuruti ketentuan pada PSAP 07 Paragraf 15, suatu barang untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunya masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan.

Berdasarkan Peraturan Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5238/PL.201/DRJD/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Perlengkapan Jalan, Perlengkapan Jalan yang diklasifikasikan menjadi Belanja Barang (52) dan Belanja Modal (53) sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Mata Anggaran
1	APILL	53 (Belanja Modal)
2	Marka Jalan	52 (Belanja Barang)
3	Paku Jalan	52 (Belanja Barang)
4	Rambu Lalin	53 (Belanja Modal)
5	Alat Penerangan Jalan	53 (Belanja Modal)
6	Pagar Pengaman	53 (Belanja Modal)
7	Cermin Tikungan	53 (Belanja Modal)
8	Delineator	52 (Belanja Barang)
9	Pita Penggaduh	52 (Belanja Barang)
10	Alat Pengendali Pengguna Jalan	53 (Belanja Modal)
11	Fasilitas Pejalan Kaki dan Sepeda	53 (Belanja Modal)

Setiap pekerjaan pengadaan dan pemasangan BMN berupa Perlengkapan Jalan yang telah selesai dan menjadi aset definitife, harus dilakukan penyesuaian pencatatan sesuai dengan jumlah unit dan nilai satuan. Penyesuaian pencatatan dilakukan pada aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan metode reklasifikasi berdasarkan dokumen pengadaan yakni kontrak, RAB, dan Laporan Bulanan. Untuk BMN yang



memenuhi kriteria sebagai Belanja Modal (53) atau Aset tetap tidak perlu dilakukan koreksi pencatatan. Koreksi pencatatan hanya digunakan untuk BMN yang memenuhi Kriteria Belanja Barang (52). Koreksi pencatatan dilakukan dengan mereklas perlengkapan jalan yang sebelumnya tercatat pada aset/neraca kedalam beban operasional sehingga akan mengurangi nilai pada Neraca.

Sampai dengan 31 Desember 2019, Nilai Paku Marka dan Marka Jalan Rp427.220.727.095,00 atau 12 persen dari total Perlengkapan Jalan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan setelah perbaikan pencatatan, yakni:

1. Melakukan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Perlengkapan Jalan setelah dilakukan reklasifikasi. Untuk BMN yang sebelumnya sudah ditetapkan status penggunaannya, perlu dilakukan proses Penetapan Status Penggunaan kembali karena ada perubahan kodefikasi Barang dan NUP;
2. Melakukan inventarisasi untuk BMN yang akan dihapuskan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menetapkan pilot project inventarisasi di lima satker sampling yakni BPTD Wilayah III Provinsi Sumatera Barat, BPTD Wilayah V Provinsi Jambi, BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah, BPTD Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan, dan BPTD Wilayah XX Provinsi Sulawesi Tengah.

Setelah dilakukan inventarisasi, Satker sampling akan melakukan proses penghapusan BMN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015.

F.7 Daftar Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS) adalah Bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah dioperasionalkan dan/atau digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan



Sementara, untuk mendukung kegiatan operasional BUMN, namun belum ada penetapan status dari pemerintah sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN.

Daftar BPYBDS pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat pada Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

F.8 Nilai Perolehan Minus dan Nilai Buku Minus

Rincian Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki Nilai Perolehan Minus dan Nilai Buku Minus pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat pada Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.





Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Gedung Karya, JL. Merdeka Barat NO 8
Jakarta 10110



TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145,
3506143, 3862220



Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>